

WIKARA

WIKARA NATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH DEVELOPMENT

Laman Jurnal: jurnal.stie-wikara.ac.id

ISSN : 2721-8120 (p) ,2797-3247 (e)

Analisis Penerapan Sipd Dan Sistem Keuangan Daerah *Next Generation* Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada Diskominfo Kabupaten Purwakarta

Ema Juwita^{1*}, Asep Yogi²

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Karta Raharja, Jawa Barat, Indonesia
2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Karta Raharja, Jawa Barat, Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Artikel History: Received: December 2023 Revised: December 2023 Published: December 2023</p> <p>Keywords: SIPD, Next Generation, Financial Performance</p>	<p><i>The research design of this study utilizes a paradigm of the relationship between two independent variables each with one dependent variable, as well as a paradigm of the relationship between two independent variables together with one dependent variable. In this qualitative research, informants are the subjects of the study who provide information about the desired data related to the ongoing research. The key informants in this study include the Head of the Department or Department Secretary, the Finance Subsection Officer at the Department of Communication and Informatics, the Functional Officer of Planning at the Department of Communication and Informatics, and the Administrator at the Regional Financial and Asset Management Agency. It can be concluded that the implementation of this system provides significant benefits in financial management. The Next Generation Local Financial System enables more efficient collection and storage of financial data, integration with other regional financial systems, as well as improved financial planning and evaluation. The implementation of the Next Generation Local Financial System also promotes transparency, public participation, and applies the principles of Good Governance.</i></p>
INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Riwayat Artikel: Diterima : Desember 2023 Direvisi: Desember 2023 Dipublikasikan : Desember 2023</p> <p>Kata kunci: SIPD, Next Generation, Kinerja Keuangan</p>	<p>Desain penelitian ini menggunakan paradigma hubungan antara dua variabel independen masing-masing terhadap satu variabel dependen, serta paradigma hubungan dua variabel independen secara simultan terhadap satu variabel dependen. Dalam penelitian kualitatif ini, informan merupakan subjek penelitian yang memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitian yang sedang berlangsung. Informan kunci dalam penelitian ini meliputi Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas, Pejabat Subbagian Keuangan pada Dinas Komunikasi dan</p>

WIKARA

WIKARA NATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH DEVELOPMENT

Laman Jurnal: jurnal.stie-wikara.ac.id

ISSN : 2721-8120 (p) ,2797-3247 (e)

Informatika, Pejabat Fungsional Perencana pada Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Administrator pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Next Generation memberikan manfaat yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini memungkinkan pengumpulan dan penyimpanan data keuangan yang lebih efisien, integrasi dengan sistem keuangan daerah lainnya, serta peningkatan dalam perencanaan dan evaluasi keuangan. Selain itu, penerapan SIPD Next Generation juga mendorong transparansi, partisipasi publik, serta penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*.

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian disempurnakan ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagai berikut: Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban keuangan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi agar dapat mempermudah proses pengelolaan data keuangan.

SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Sementara itu, tujuannya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah. Sistem informasi keuangan daerah merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan mendokumentasikan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Pada tahun 2022, sistem informasi keuangan daerah sudah diperbarui menjadi sistem informasi manajemen daerah-*next generation* (selanjutnya disingkat sistem informasi keuangan daerah-ng) atau sistem informasi keuangan daerah financial management information system (selanjutnya disingkat sistem informasi keuangan daerah fmis). Dalam sistem informasi keuangan daerah-ng atau sistem informasi keuangan daerah fmis, selain berbasis web, sistem informasi keuangan daerah ini juga mengintegrasikan sistem informasi keuangan daerah perencanaan dan sistem informasi keuangan daerah keuangan. Sistem informasi keuangan daerah sebelumnya (sistem informasi keuangan daerah keuangan versi 2.9.0.9), masih harus menginput ulang anggaran, karena sistemnya belum terintegrasi dan menggunakan aplikasi berbeda. Akibatnya, hal ini mengarah pada teori human computer interaction (hci), dari keinginan dan keyakinan pengguna terhadap sistem, yang berimplikasi pada perilaku penggunaannya untuk menggunakan sistem. Sistem informasi keuangan daerah ini diluncurkan bpkp pada 2020, didasarkan pada perpres 95/2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe), continuous auditing dan continuous monitoring (cacm), dan cash management system (cms), karena sistemnya

yang berbasis web dengan kementerian. Selain peraturan di atas, penerapan sistem informasi keuangan daerah juga didasarkan pada permendagri 64/2013 jo. peraturan kementerian dalam negeri (permendagri) nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan keuangan daerah dan permendagri 13/2006 jo. peraturan kementerian dalam negeri (permendagri) nomor 77 tahun 2020. Dalam peraturan ini, kodifikasi akun bas (bagian akun standar) sudah berubah, dari 7 digit menjadi 11 digit, karena adanya 3 digit kode sub rincian obyek. Namun dari segi jumlah akun besar, justru jumlah akun berkurang, dari 9 akun menjadi 8 akun, karena akun transfer dioper ke akun belanja.

Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek (Nugroho, 2012:17).

Menurut kepala bagian keuangan dinas komunikasi dan informatika Rina Rosdiana database yang digunakan sistem informasi keuangan daerah dan SIPD tidak sama karena ketika input laporan di sistem informasi keuangan daerah atau SIPD harus input ulang lagi, Pelaporan masing masing yaitu SIPD di peruntukan untuk penganggaran dan untuk sistem informasi keuangan daerah pelaporan realisasi tetapi harus melaporkan kedua duanya dan yang terakhir yaitu standar harga dari kementerian dan pemerintah daerah berbeda.

Maka penulis memutuskan untuk melaksanakan penelitian berjudul **“Analisis Penerapan SIPD dan Sistem Keuangan Daerah *Next Generation* dalam meningkatkan kinerja keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta”**. Berlandaskan hal tersebut, maka dapat diperoleh rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan SIPD dalam meningkatkan kinerja keuangan Dinas komunikasi dan informatika kabupaten purwakarta? Bagaimana sistem keuangan daerah *Next Generation* dalam meningkatkan kinerja keuangan pada Dinas komunikasi dan informatika kabupaten purwakarta? Serta Bagaimana penerapan SIPD dan sistem keuangan daerah *Next Generation* dalam kinerja keuangan pada Dinas komunikasi dan informatika kabupaten purwakarta? Tujuan atas penelitian ini untuk mengetahui penerapan SIPD dalam meningkatkan kinerja keuangan Dinas komunikasi dan informatika kabupaten purwakarta, mengetahui sistem keuangan daerah *Next Generation* dalam meningkatkan kinerja keuangan pada Dinas komunikasi dan informatika kabupaten purwakarta, serta mengetahui implementasi SIPD dan sistem

keuangan daerah *Next Generation* dalam kinerja keuangan pada Dinas komunikasi dan informatika kabupaten purwakarta.

Sistem SIPD

Dengan dikeluarkannya UU No 23 tahun 2014, maka menteri dalam negeri mengeluarkan Permendagri No.70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan seperti yang terdapat pada pasal 1 ayat 12 sistem informasi pemerintahan daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Lampiran.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dirancang oleh Kemendagri sebagai tujuan guna membenarkan alur tahapan penataan dokumen rencana daerah yang sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan. BPKP sebagai selaku pengemban amanat pembina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah sesuai PP No 60 tahun 2008 dalam meningkatkan SIPD mengacu pada syarat perundang-undangan serta aplikasi pengelolaan Perencanaan serta Anggaran bersumber pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah mempraktikkan Sistem Data Pemerintahan Daerah (SIPD) semenjak tahun 2020 yang tadinya memakai Sistem Informasi Manajemen Daerah (Sistem Informasi Keuangan Daerah). Penerapan SIPD ini sangat diharapkan untuk memperbaiki birokrasi yang semakin maju (Jogiyanto., 2010).

Indikator Sistem SIPD

Direktur Jeindeiral (Dirjein) Bina Keuangan Daerah (Keiuda) Keimeinteirian Dalam Neigeiri (Keimeindagri) Agus Fatoni meinjeilaskan, Sisteim Informasi Peimeirintahan Daeirah (SIPD) bukan hanya teirkait deingan peingeilolaan keiuangan daeirah seimata. Namun, sisteim itu juga beirpeiran dalam proseis inteigrasi ei-Databasei, ei-Planning, ei-Moneiv, dan ei-Reiporting.

Sistem Keuangan Daerah *Next Generation*

Menurut Sutarman (2012:13): “Sistem informasi adalah sistem yang dapat didefinisikan dengan mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, menyebarkan informasi untuk

tujuan tertentu. Seperti sistem lainnya, sebuah sistem informasi terdiri atas input (data, instruksi) dan output (laporan, kalkulasi)".

Menurut Rosmery Elsy (2016:2): "Pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah". Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa sistem informasi ini juga merupakan salah satu fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

Indikator Sistem Keuangan Daerah *Next Generation*

Menurut Rosmery Elsy (2016:2) yang terkait pada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah meliputi: Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Kinerja Keuangan

Menurut Heiry (2016:13) kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat prospek pertumbuhan dan keseimbangan keuangan perusahaan dari mengandalkan sumber daya yang dimilikinya. Perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Keuangan

Menurut Jumingan (2018 ; 240), "ada beberapa tahap dalam pengukuran kinerja keuangan adalah : Review data laporan, menghitung, membandingkan atau mengukur, menginterpretasi dan solusi.

Penelitian terdahulu

Intan Rakhmawati (2022) melakukan penelitian yang berjudul Analisa Sistem informasi keuangan daerah-*Next Generation* (Sistem informasi keuangan daerah-*Ng*). diperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa dari segi sustainability, sistem informasi keuangan daerah keuangan v.2.9.0.9 memberikan efektivitas sistem untuk pencatatan dan pelaporan transaksi yang lebih baik, karena aplikasi ini sudah stabil. namun dari segi sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe), sistem informasi keuangan daerah-*ng* lebih baik, walaupun masih terus melalui update. penelitian ini berimplikasi sebagai pengujian awal atas efektivitas dan kestabilan sistem, sesuai

peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Irmayani Natsir, Ansyarif Khalid, dan Samsul Rizal (2017). Dengan hasil penelitian secara umum pegawai bpkd gowa sudah memahami makna sistem informasi keuangan daerah keuangan serta gambaran pelaksanaannya yang berkaitan dengan input dan output datanya. faktor-faktor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan penerapan sistem informasi keuangan daerah keuangan yaitu komunikasi, sumber daya manusia, sikap/disposisi dan struktur birokrasi, adapun kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan sistem informasi keuangan daerah keuangan yaitu andal, tepat waktu serta relevan.

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan ditulis oleh Muhammad Irfan Nasution dan Nurwani (2021). Hasil penelitian menjelaskan bahwa bpkad kota medan sudah menggunakan regional aplikasi sistem informasi pemerintah (sipd) untuk menjalankan berbagai kebijakan yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai hal kegiatan yang merupakan program dari pemerintah kota medan. dan berdasarkan informasi yang diperoleh, para sistem informasi pemerintahan daerah (sipd) berfungsi memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah lainnya, termasuk pemerintahan daerah sistem pembinaan dan pengawasan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun objek pada penelitian ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta. Subjek penelitiannya ialah Kepala Dinas / Sekretaris Dinas Diskominfo, Kasubag keuangan Diskominfo, Pejabat Fungsional perencanaan Diskominfo dan Admin pada BKAD Kabupaten Purwakarta.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam data penelitian kualitatif diperoleh dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, triangulasi adalah proses menggabungkan beberapa metode pengumpulan data dan sumber data yang dihasilkan. Untuk menilai validitas data, peneliti menggunakan triangulasi, yang melibatkan perbandingan reliabilitas data di berbagai sumber data dan metode pengumpulan data (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa Pada tahun anggaran 2022, pendapatan daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan pendapatan terutama berasal dari dua sumber utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Retribusi Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh daerah dari berbagai sumber seperti pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain sebagainya. Pada tahun 2022, PAD meningkat dari 800.000.000,00 menjadi 1.034.535.900,00. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi atau peningkatan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya daerah. Dalam keseluruhan, penerapan SIPD dan konsep Keuangan Daerah Next Generation dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta. Hal ini meliputi peningkatan pendapatan, pengelolaan belanja yang efisien, pengendalian defisit anggaran, perencanaan keuangan yang matang, dan pengawasan neraca yang baik. Dengan adanya keselarasan antara penerapan sistem informasi dan prinsip-prinsip keuangan yang baik, diharapkan dapat mencapai tujuan keuangan yang lebih baik dan mendorong perkembangan Dinas secara keseluruhan. Penerapan SIPD dan sistem keuangan daerah Next Generation memiliki potensi besar dalam meningkatkan kinerja keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta. Melalui integrasi sistem informasi, pengelolaan database yang baik, perencanaan anggaran yang terencana, dan pengawasan yang efektif, Dinas tersebut dapat mencapai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, pembahasan ini menggambarkan nilai strategis dan manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan SIPD dan keuangan daerah Next Generation dalam meningkatkan kinerja keuangan di lingkungan tersebut.

Selanjutnya peneliti memberikan kesimpulan bahwa adanya keterbatasan sumber daya manusia yang mana penerapan sistem baru seperti SIPD dan sistem keuangan daerah Next Generation memerlukan keahlian khusus dalam pengelolaan dan penggunaannya. Dalam hal ini, tantangan dapat muncul jika organisasi tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup terlatih dan berpengalaman dalam hal tersebut. Pelatihan dan pengembangan keterampilan menjadi penting untuk mengatasi tantangan ini. Selanjutnya keterbatasan infrastruktur teknologi dimana penerapan sistem yang terintegrasi seperti SIPD dan keuangan daerah Next Generation memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai. Tantangan dapat muncul jika organisasi tidak memiliki infrastruktur yang memadai, seperti konektivitas internet yang stabil, perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, serta sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data sensitif. Yang terakhir adalah adanya perubahan budaya organisasi, penerapan SIPD dan sistem keuangan daerah Next Generation juga melibatkan perubahan budaya organisasi dalam pengelolaan keuangan.

Tantangan dapat muncul jika ada resistensi atau ketidakmampuan untuk mengadopsi perubahan ini. Diperlukan komunikasi yang efektif dan dukungan dari manajemen untuk memastikan bahwa perubahan budaya ini dapat terjadi dengan lancar.

KESIMPULAN

Menampilkan kesimpulan penelitian, implikasi, dan saran untuk penelitian selanjutnya. Implikasi adalah saran praktis dari hasil penelitian, sedangkan saran penelitian adalah saran yang diberikan untuk penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka hanya berisi rujukan yang terdapat dalam artikel ini. Format penulisan mengikuti format APA (*American Psychological Association*).